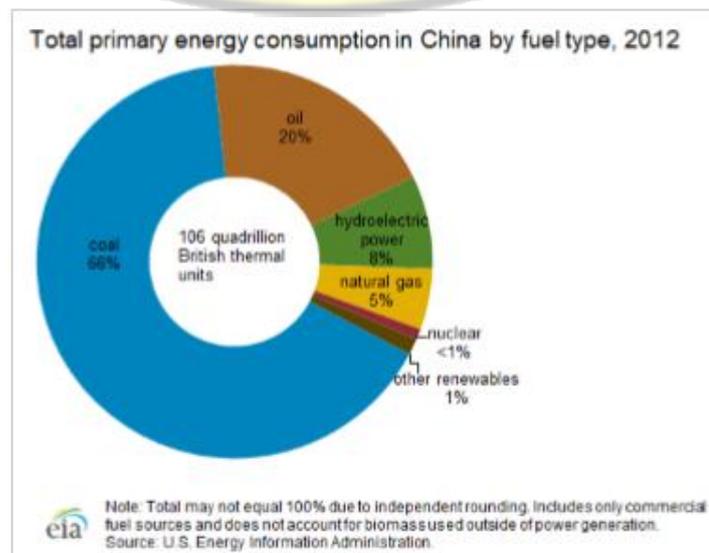


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

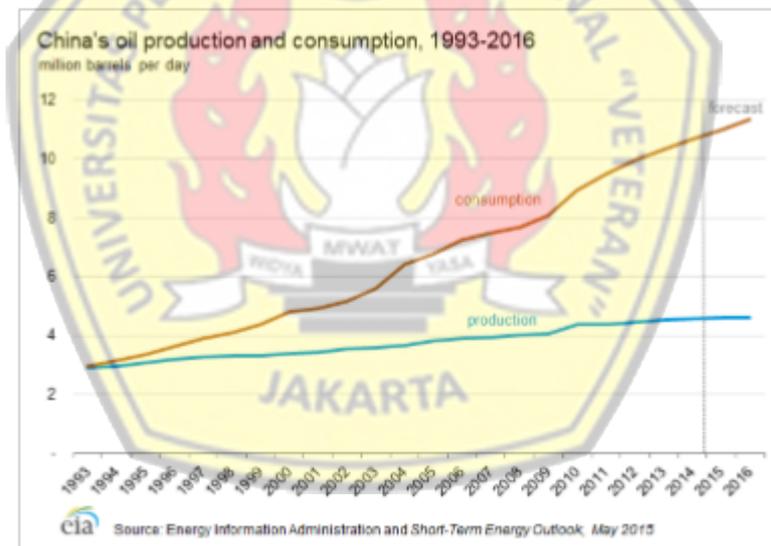
Energi merupakan pilar utama dari pertumbuhan dan perkembangan global, dalam era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan bagi sebuah Negara dan hal itu harus diseimbangkan dengan pembangunan dan perkembangan industri. Hal tersebut akan secara otomatis mendorong sebuah negara untuk memiliki suplai energi yang cukup dalam proses pembangunan dan perkembangan industrinya. Ekonomi dunia dapat berjalan dengan adanya ketersediaan minyak, bila terdapat sebuah gangguan akan suplai minyak atau ketidak stabilan harga akan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi negara-negara industri. Asia merupakan kawasan yang pertumbuhan ekonominya begitu pesat dan tentu akan membutuhkan suplai energi yang memadai untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di negara-negara maju dan berkembang kawasan Asia. Cina yang terbilang negara maju di kawasan Asia merupakan salah satu negara yang memiliki begitu banyak kawasan industri aktif tentu akan mendorong tingginya tingkat konsumsi energi di Cina. Minyak merupakan salah satu yang menjadi penunjang berjalannya roda perekonomian di Cina, karena minyak menempati urutan kedua dalam total penggunaan energi di Cina setelah batubara dengan total 20% dari penggunaan keseluruhan konsumsi energi di Cina.

Gambar 1.1 Jenis-jenis energi primer di Cina (www.eia.gov, 2012)



Menurut gambar diatas, Cina membutuhkan begitu banyak suplai energi pertahunnya untuk menunjang jalannya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Cina. Jika laju pertumbuhan ekonomi Cina terus meningkat, hal ini akan berdampak pada kenaikan tingkat impor 60% – 80% dari total konsumsi minyak domestiknya atau sekitar 6 – 11 juta barrel per hari pada tahun 2020 nanti (Erica Downs, 2006, 9- 10). Namun dalam kondisi permintaan energi minyak yang begitu banyak dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan, Cina bukanlah sebuah negara dengan kekayaan energi yang melimpah. Selama ini Cina terus memenuhi kebutuhan energinya dengan tergantung pada impor dari negara lain, karena jumlah produksi minyak di Cina sendiri tidak sebanding dengan jumlah konsumsi minyak di Negara tersebut.

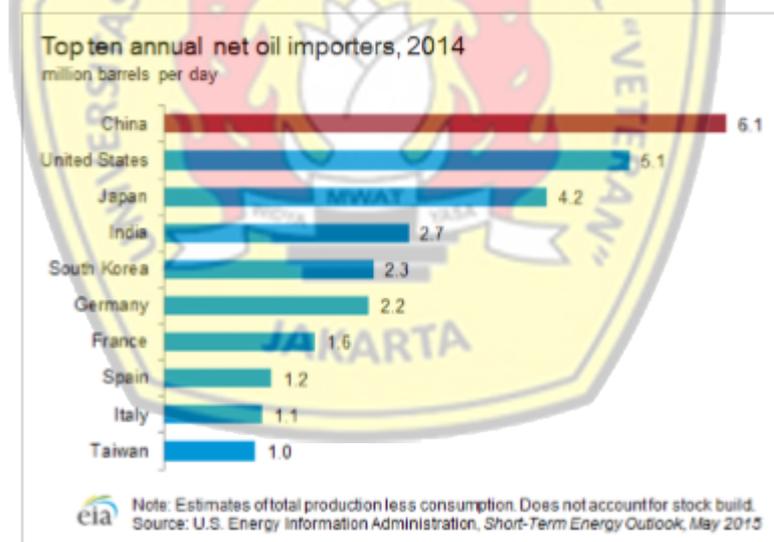
Gambar 1.2 Produksi dan Konsumsi minyak Cina tahun 1993 - 2016
(www.eia.gov, 2016)



Tidak seimbangnya tingkat konsumsi dan produksi minyak di Cina memberikan permasalahan yang cukup serius bagi Cina untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebuah negara membutuhkan kepastian akan adanya jaminan suplai energi dari negara pengimpor dalam jangka panjang. Cina masih memiliki ketergantungan yang begitu besar terhadap minyak dan mengandalkan minyak sebagai energi utama, dikarenakan proses diversifikasi dengan mengganti sumber energi selain minyak membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses diversifikasi. Tidak memiliki

jaminan dalam ketersediaan energi juga stabilitas harga menjadi masalah yang sangat vital bagi keamanan sebuah negara karena hal itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian. Konsep keamanan energi menjadi sebuah kacamata yang layak digunakan dalam masalah ini, karena beberapa hal berikut. Pertama karena tidak memiliki jaminan apakah minyak akan terjangkau dan tersedia jika permintaan terus meningkat dan suplai terganggu. Kedua, karena bahan bakar fosil kurang ramah lingkungan serta mahal dalam biaya produksi maupun penggunaannya. Ketiga, nuklir telah dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil dengan ketersediaan yang berlimpah, bersih dan murah ternyata menuai resiko yang selama dua dekade terakhir terbukti telah menyebabkan kecelakaan fatal (Alan Dupont, 2001:70). Tiga isu tersebut terus menghantui negara-negara pengimpor energi.

Gambar 1.3 Negara-negara pengimpor minyak terbesar 2014 (www.eia.gov, 2014)



Berdasarkan data diatas, maka Cina sebagai negara industri dengan konsumsi impor energi yang besar tentu harus memiliki sejumlah negara-negara pengekspor minyak yang bisa menjamin pembangunan ekonomi di Cina berjalan dengan baik. Di antara berbagai sumber energi, minyak memiliki pangsa terbesar dalam konsumsi energi global. Cadangan energi minyak cenderung menurun seiring dengan besarnya konsumsi energi dunia, beberapa daerah, terutama di Timur Tengah yang telah berada di garis depan dengan cadangan terbesar, dapat

memenuhi meningkatnya permintaan energi global. Cina mulai menjadi importir minyak di Timur Tengah pada tahun 1993. Cina mendapatkan pasokan terbesar dari Arab Saudi dan Iran yang memenuhi 30% impor minyak, sisanya diperoleh dari Eropa (14,3%), dan Asia Pasifik (11,5%) (David Zweig dan Bi Jianhai, 2005:28).

Pada tahun 2005, Iran adalah pemasok minyak urutan ketiga di Timur Tengah masih berada di belakang Arab Saudi, sekitar 14% dari kebutuhan Cina. Namun impor di bulan Januari 2006, Iran menggeser Arab Saudi sebagai pengimpor minyak nomor satu ke Cina. Perlu dicatat bahwa minyak mentah Iran tidak hanya membantu memenuhi melonjaknya kebutuhan konsumsi Cina, tetapi membantu mencegah kenaikan biaya impor melalui pembelian yang relatif murah. Hal ini tentu saja dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Cina, dengan berfikir bahwa Iran merupakan rekan bisnis yang sangat menguntungkan bagi Cina dalam bidang energi. Maka segala cara akan dilakukan Cina dalam menjaga hubungan baik dengan Iran, dengan kondisi Iran saat ini dalam tekanan Amerika Serikat (AS) terkait proyek nuklir yang dilakukan oleh Iran tentu saja sangat menguntungkan Cina. Pengembangan nuklir merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh dunia, negara- negara yang mengembangkan nuklir dalam kasus ini adalah Iran dianggap mengancam stabilitas keamanan dunia. Negara-negara besar seperti AS akan sangat khawatir jika negara-negara lain diluar dari Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengembangkan proyek nuklir, secara resmi tahun 2006 AS membawa permasalahan ini kepada Dewan keamanan PBB.

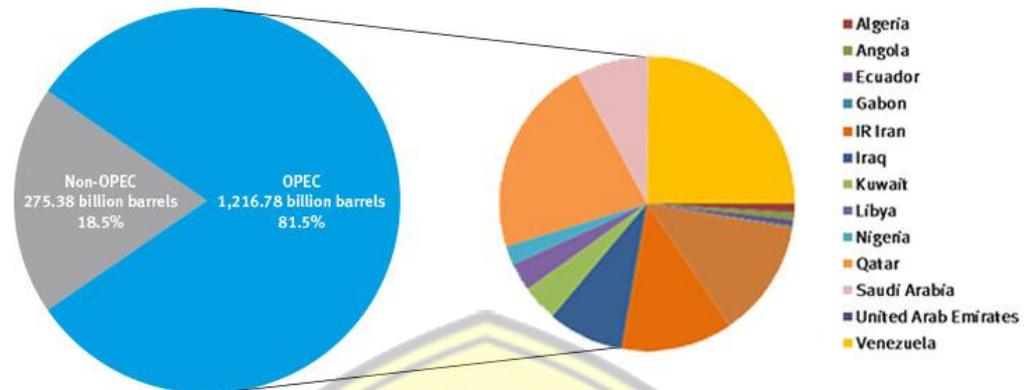
Dalam Prosesnya AS terus mengharapkan dukungan dari negara-negara pemegang hak veto lain untuk mendukung pemberhentian program nuklir Iran, namun berbeda dari negara-negara Eropa, Cina dan Rusia cenderung menolak atas penerapan sanksi untuk menyelesaikan krisis nuklir di Iran. Cina tidak memiliki pandangan yang sama dengan negara-negara Barat yang menganggap proyek nuklir Iran sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Pandangan Cina tersebut didukung dengan fakta hingga saat ini Iran masih tetap menjadi anggota *Nuclear non-Proliferation Treaty* (NPT), dan dalam mekanisme

pengembangan nuklirnya masih berada di bawah kontrol *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Cina menyarankan mekanisme dialog dan negosiasi dalam proses penyelesaian krisis nuklir ini, selama Iran masih bisa bekerjasama dengan IAEA terkait pengembangan nuklirnya. Tentu saja hal itu menjamin hak secara legal untuk memiliki teknologi nuklir bertujuan damai untuk negara-negara yang telah menandatangani perjanjian NPT.

Pada tahun 2011 Presiden AS saat itu Barack Obama menandatangani sanksi kepada Iran terkait program nuklir yang dilakukan Iran, yang pada saat itu adanya pelarangan perusahaan-perusahaan AS untuk bekerjasama dengan *Iran's Central Bank* yang merupakan institusi terpenting dalam bisnis minyak Iran (www.bbc.com, 2011). Hal ini sedikit banyak tentu akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan asing lain untuk keluar dari Iran terutama yang melakukan investasi di bidang energi karena pengaruh dari AS itu sendiri. Disamping hal itu banyak negara yang melakukan divestasi dari industri perminyakan Iran, Cina justru mengambil peluang baru ini untuk masuk melakukan investasi ke Iran. Menurut laporan 2011 oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah, 20 dari 38 perusahaan asing non-Cina yang melakukan investasi di industri perminyakan Iran sebelum 2010 telah didivestasi atau dalam proses divestasi. (www.uscc.gov, 2011). Pada 2012 dan 2013 pembelian China dari Iran turun menjadi hanya 8% dari total impor minyak mentahnya. Kemajuan dalam negosiasi antara Iran dan negara-negara P-5+1 pada akhir tahun 2013 memungkinkan China untuk mengembalikan tingkat impor minyak mentah dari Iran ke tingkat pra-sanksi. Makanya, pada 2014 volume minyak mentah yang China bersumber dari Iran meningkat sebesar 28%. Meskipun upaya AS untuk memberikan sanksi kepada Iran atas tuduhan mengejar senjata pemusnah massal nuklir, Cina tetap menjadi investor besar di industri perminyakan Iran dan penyedia utama produk minyak sulingan bagi Iran.

Gambar 1.4 Cadangan Minyak Negara-negara *Organizations of Petroleum Exports Country* (OPEC) 2016 (<http://www.opec.org> , 2016)

OPEC share of world crude oil reserves, 2016



OPEC proven crude oil reserves , at end 2016 (billion barrels, OPEC share)

Venezuela	302.25	24.8%	Kuwait	101.50	8.3%	Qatar	25.24	2.1%	Gabon	2.00	0.2%
Saudi Arabia	266.21	21.9%	United Arab Emirates	97.80	8.0%	Algeria	12.20	1.0%			
IRIran	157.20	12.9%	Libya	48.36	4.0%	Angola	9.52	0.8%			
Iraq	148.77	12.2%	Nigeria	37.45	3.1%	Ecuador	8.27	0.7%			

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2017.

Berdasarkan grafik diatas jelas bahwa Iran memiliki cadangan minyak di urutan ketiga setelah Saudi Arabia dan Venezuela, dan masih diduga memiliki lebih banyak lagi cadangan minyak dari data diatas dikarenakan banyak sekali wilayah di Iran sendiri yang belum dieksploitasi dan dieksplorasi dikarenakan kekurangannya teknologi untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini Cina memanfaatkan keadaan dengan sangat baik dengan melakukan investasi dan transfer teknologi dengan Iran disaat Negara-negara lain melakukan divestasi dari Iran karena adanya pengaruh AS disana mengenai isu pengembangan nuklir Iran. Menurut data statistic yang dikeluarkan oleh OPEC Venezuela dan Saudi Arabia sudah memiliki banyak sekali relasi atau destinasi ekspor minyak mentah yang mereka produksi, sedangkan Iran hingga 2016 belum memiliki Negara destinasi ekspornya, sehingga Cina juga memandang bahwa ini adalah sebuah peluang untuk memperoleh suplai energi yang terjamin dan memiliki tingkat keberlangsungan yang tinggi demi menjaga keamanan energi bagi Cina, namun dibalik itu Cina harus melakukan beberapa strategi dan penerapan kebijakan terkait adanya desakan dari AS terhadap Iran mengenai isu nuklir.

I.2 Rumusan Masalah

Cina terus memberikan dukungan politik terhadap Iran yang mendapat tekanan dari AS seputar isu pengembangan nuklir, seiring dengan tekanan yang terus diberikan oleh AS terhadap Iran, maka kebijakan-kebijakan Cina akan terus dibuat dalam rangka menjaga kerjasama energi dengan Iran dalam pemenuhan kebutuhan energi Cina. Terkait hal itu maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah yang akan coba dijawab yaitu **Bagaimana Kebijakan Cina dalam meningkatkan kerjasama energi dengan Iran pada periode 2011 - 2015 ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dinamika hubungan kerjasama ekonomi Cina - Iran di sektor energi.
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan Cina dalam upayanya untuk meningkatkan kerjasama energi dengan Iran periode 2011 - 2015.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengembangkan studi hubungan internasional mengenai kebijakan Cina dalam upaya meningkatkan kerjasama energi dengan Iran.
2. Manfaatakademis : penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk data tertulis maupun tabel atau grafik dalam jurusan Hubungan Internasional yang berhubungan dengan kebijakan Cina dalam upaya meningkatkan kerjasama energi dengan Iran, dalam upaya Cina untuk mencari suplai energi demi kelangsungan perekonomian Cina atas dasar *national interest* serta di kemudian hari dapat di gunakan sebagai tinjauan pelajaran di fakultas FISIP UPN "Veteran" Jakarta.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan energi Cina telah banyak dilakukan. Banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan energi Cina tersebut menunjukkan perhatian terhadap tindakan yang dilakukan Cina untuk mencapai keamanan energi. Dikarenakan dampak yang cukup besar bagi keamanan energi dunia, melihat kebutuhan energi Cina sangat besar untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Berbagai buku, jurnal, serta penelitian ilmiah telah dilakukan untuk menganalisa fenomena tersebut. Tinjauan pustaka ini akan melihat berbagai sumber ilmiah yang menganalisa kebijakan dan strategi Cina yang ditujukan untuk mengamankan pasokan energi. Dalam tinjauan pustaka ini penulis mencoba membaginya menjadi sub-bab mengenai keamanan energi Cina dan Kerjasama energi Cina - Iran.

Sumber pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh United States - China Economic and Security Review Commission, 2013 mengenai "*China - Iran : A Limited Partnership*". Penelitian ini membahas mengenai hubungan kerjasama antara Cina dengan Iran, dalam sebuah sub bab di buku ini terdapat fakta bahwa Iran membutuhkan modal investasi dan teknologi di sektor minyak dan gas, baik dalam pengembangan hulu (penyulingan) hingga hilir (distribusi). Cina hadir untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan minyak internasional terkait hukuman sanksi dan kondisi operasi yang merugikan, melalui *China's National Oil Companies* (NOCs) Cina menawarkan proyek-proyek pembangunan dan pengelolaan migas hingga transfer teknologi di Iran. NOCs juga telah menjanjikan investasi senilai miliaran dolar di sektor migas Iran terutama di bidang gas Pars Selatan dan ladang minyak Azadegan.

Penelitian ini sangat membantu penulis dalam melengkapi data yang dibutuhkan, terutama dalam menganalisis bagaimana penerapan kerjasama dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh Cina untuk terus menjaga hubungan dengan Iran dan meningkatkan kerjasama energi melalui investasi. Didalam penelitian ini hanya terfokus pada kerjasama ekonomi antara Cina dan Iran, tidak melihat dimensi politik dari adanya kerjasama tersebut. Penulis yang akan mencoba untuk

memaparkan lebih jauh lagi kepada kebijakan energi Cina dalam meningkatkan kerjasama antara kedua negara baik di sektor ekonomi maupun politik.

Sumber berikutnya penulis mengambil dari *journal of peace studies* Hubungan Internasional yang berjudul "*Energy Factor China - Iran Relations*" karya Mahnaz Zahirinejad dan Vrushal Ghoble. Hubungan Cina Iran tidak begitu baik sampai Cina menyadari bahwa Iran merupakan aliansi yang baik dalam mencari keamanan energi seiring pertumbuhan ekonomi Cina. Dengan begitu banyak kebijakan yang diambil Cina sampai mengesampingkan hubungannya dengan AS untuk terus menjaga hubungan baik dengan Iran, hingga menuntun mereka pada kerjasama energi. Menurut Mahnaz dan Vrushal kesepakatan minyak dan gas yang terus berlanjut antara kedua negara akan memperdalam hubungan mereka setidaknya dalam tiga dekade ke depan. Iran membutuhkan pasar Cina yang besar dan Cina ingin mendapatkan keuntungan tertinggi dari energi Iran. Potensi kerjasama bilateral antara Iran dan China melampaui bidang energi, dan jika direalisasikan, mereka dapat memiliki konsekuensi politik dan keamanan yang positif. Hingga saat ini hubungan Cina dan Iran dalam kerjasama energi terus berjalan dan aspek politik serta ekonomipun akan terus mengikuti hubungan ini.

Berbeda dengan pemikiran penulis yang mengindikasikan adanya keamanan energi Cina yang terancam, penulis akan mencoba memaparkan mengenai hubungan antara Cina dengan beberapa Negara-negara di timur tengah seperti Arab Saudi yang menjadi salah satu Negara pengimpor minyak bagi Cina. Karena dalam sebuah keamanan energi Cina juga harus menciptakan sustainability dalam artian bahwa Cina harus memiliki cadangan atau suplai energi yang berkelanjutan, melihat begitu banyak Negara-negara yang menjadi tujuan impor Arab Saudi termasuk AS maka Cina harus memiliki perencanaan untuk segera mencari Negara suplai baru yaitu Iran. Dalam hal ini Iran sebagai Negara yang juga kaya akan minyak membutuhkan bantuan teknologi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak di Negara tersebut maka Cina datang sebagai sebuah Negara investor dalam bidang teknologi tersebut.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Keamanan Energi (*Enegy Security*)

Pendekatan *Energy Security* atau Keamanan Energi dapat digambarkan sebagai "ketersediaan fisik terganggu dengan harga yang terjangkau, dengan tetap menghormati keprihatinan lingkungan". Keamanan Energi memiliki banyak aspek: keamanan jangka panjang energi terkait dengan investasi yang tepat serta waktu untuk memasok energi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan lingkungan. Di sisi lain, jangka pendek keamanan energi adalah kemampuan dari sistem energi untuk bereaksi secara cepat terhadap perubahan mendadak dalam suplai dan permintaan. Cara lain untuk melihat keamanan energi adalah mempelajari sumber energi yang berbeda (batubara, minyak, gas, dan energi terbarukan), sarana prasarana (kebutuhan listrik, kilang, mode transportasi, jaringan pipa dan pelabuhan kapal). Semua ini memiliki risiko gangguan pasokan atau kegagalan, menantang keamanan pasokan energi terganggu.

Energy Security merupakan istilah yang melekat erat pada suatu kondisi terjaminnya pasokan kebutuhan energi terutama minyak dan gas alam suatu negara demi keberlangsungan dan eksistensi negara secara ekonomi maupun pertahanan. Pasokan energi tersebut dapat berasal baik dari cadangan domestik maupun suplai energi global. Pemenuhan energi merupakan hal yang vital bagi semua negara dimana kebutuhan tersebut terkait satu sama lain dan saling tergantung pada pasokan energi dunia. Hal ini sangatlah fundamental bagi keberlangsungan sistem internasional. Untuk itu, dalam isu *energy security* ini masalah distribusi dan akses yangimbang menjadi perhatian utama. Menurut Daniel Yergin, konsep *Energy Security* meliputi dua dimensi, yaitu dimensi keindependenan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya yang berasal dari sumber daya energi domestik, dan dimensi interdependensi global dimana pemenuhan energi setiap negara tak lepas dari pasokan energi dunia yang berasal dari, khususnya, negara-negara pengeksport yang kaya akan sumber minyak dan gas (Daniel Yergin, 2006, 81 -82). Menurut dimensi yang dikemukakan oleh Daniel Yergin terkait penelitian penulis bahwa ada interpedensi global yang

mengharuskan sebuah negara memenuhi kebutuhannya dari pasokan energi global, seperti Cina yang menggantungkan kebutuhan energi minyak pada Iran.

Jonathan Elkind, menyebutkan bahwa keamanan energi mengandung empat elemen, yaitu: ketersediaan (*availability*), keandalan (*reliability*), keterjangkauan (*affordability*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketersediaan, mengacu pada kemampuan konsumen dan pengguna untuk mengamankan energi yang diperlukannya (Jonathan Elkind, 2007, hal 3-5) Komponen penduduknya adalah solusi teknis pada produksi, transportasi, konvensi, penyimpanan, dan distribusi. a.) Keandalan, mengacu pada pelayanan energi yang bebas dari gangguan, dengan kriteria yang saling terkait, termasuk: (1) Keanekaragaman sumber energi (bahan bakar dan teknologinya); (2) Keanekaragaman rantai suplai energi; (3) Kemampuan mengatasi kegagalan dalam proses pengembangan energi; (4) Menurunkan kebutuhan energi agar mengurangi beban dari infrastruktur; (5) Redundansi pada kasus terjadinya kegagalan; (6) Menyebarkan informasi kemasyarakat setiap waktu. b.) Keterjangkauan, melibatkan tidak hanya harga yang murah, tetapi juga harga yang stabil. c.) Keberlanjutan, mengacu pada mengurangi kerusakan aspek sosial, ekonomi, lingkungan melalui tersedianya infrastruktur energi yang tahan lama. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut dapat memunculkan konflik energi global (*fueling conflict*) apabila terjadi energy insecurity dan krisis energi seperti pengalaman sejarah masa lalu. Terlebih dunia kontemporer sekarang semakin kompleks dan trend kebutuhan energi semakin tinggi untuk menyokong industrialisasi dan teknologi.

Konsep keamanan energi merupakan media untuk menjelaskan latar belakang Cina untuk menjalin kerjasama energi dengan Iran. Konsep ini menyediakan ruang yang cukup bagi peneliti untuk membuka inti dari permasalahan energi yang dialami Cina karena ketidak seimbangan antara produksi dan permintaan energi yang dialami oleh Cina. Konsep ini juga dapat membantu menjelaskan keuntungan Iran dalam investasi yang ditanamkan Cina dalam sektor hulu dan hilir.

I.6.2 Teori Kebijakan Luar Negeri

Terdapat aspek-aspek dalam kebijakan luar negeri menurut Roy C. Macridis yang ditekankan dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Yang pertama adalah kriteria yang bersifat normatif, dimana kebijakan luar negeri dinilai dari hasil yang akan didapatkan apakah baik atau buruk. Yang kedua lebih menekankan pada *power* dari suatu negara dalam melaksanakan kepentingannya. Yang ketiga melalui pendekatan instrumental, yaitu mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan tujuan yang ingin diraih (Roy C. Macridis, 1962, hal 34).

Terkait dengan kebijakan luar negeri, Reynold mendefinisikannya sebagai sejumlah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan badan lain yang juga bertindak di tingkat internasional dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional. (P.A.Reynold, 1971, hal 63). Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Morgenthau dimana sebuah kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara harus dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya. (Hans. J. Morgenthau, 1951, hal 77). Terkait dengan penelitian penulis teori kebijakan luar negeri diharapkan dapat membantu penulis dalam melihat bagaimana Cina dengan kepentingannya, kemandirian energi dalam hal ini, hadir untuk Iran ditengah tekanan AS terkait isu pengembangan nuklir Iran. Menggunakan kekuatan Cina sebagai salah satu dewan keamanan PBB Cina memberikan angin baik bagi Iran terkait isu pengembangan nuklir yang sedang dihadapi Iran. Teori ini juga diharapkan mampu dalam menjelaskan langkah-langkah Cina dalam meningkatkan kerjasama energi antara Cina dan Iran.

I.6.3 Konsep Kerjasama Bilateral

Dalam era globalisasi negara tentu membutuhkan negara lain dalam berbagai hal, terkait asumsi tersebut sebuah hubungan bilateral hadir. Sebuah negara tidak akan bisa mempertahankan eksistensinya dan memenuhi kebutuhan rakyatnya jika tidak berhubungan dengan dunia internasional, rasa saling membutuhkan inilah yang lahir menjadi hubungan antar negara baik dalam hal kerjasama atau hal yang bersifat saling menguntungkan lainnya. Dalam sejumlah isu yang menyertai negara, ada sebuah proses dimana pemerintah negara saling

mendekati satu sama lain dengan merundingkan dan membahas masalah tersebut hingga pada proses penyelesaian yang berakhir dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang tidak merugikan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama (K.J. Holsti terjemahan M.Tahir Azhary edisi keempat jilid 2, hlm 41).

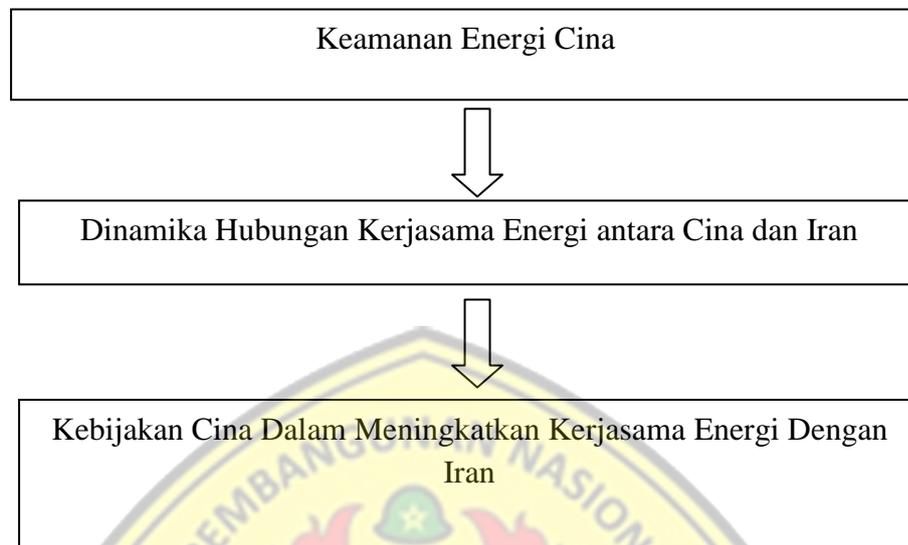
Sebuah kerjasama yang terjadi secara langsung antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan secara umum bisa dikatakan adalah kerjasama bilateral. Dalam prosesnya kerjasama bilateral dengan jangka waktu yang panjang pasti akan terjadi dinamika antara kedua belah pihak, karena pasti akan terbentur dengan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Kerjasama bilateral membutuhkan cara-cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan mempertimbangkan hal yang saling menguntungkan, dibutuhkan juga berbagai cara untuk mencegah dan menghindari konflik yang bisa saja terjadi didalam proses kerjasama ini. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan konsep bilateral untuk menggambarkan hubungan antara kedua negara dalam hal ini Cina dan Iran yang didalamnya terdapat berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan militer.

Kerjasama bilateral bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang didalamnya melibatkan kedua negara untuk memastikan hubungan jangka panjang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dilakukan oleh *state-to-state*, yang didalamnya terdapat aktor negara sebagai pembuat keputusan untuk menentukan hasil dari perundingan perjanjian kerjasama. Biasanya dalam kesepakatan ini ada berbagai bidang yang terkandung di dalamnya, politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan pertahanan dan bidang lainnya. Sebuah perjanjian yang dihasilkan dari kerjasama bilateral biasanya memiliki peran penting dalam adanya transfer teknologi, pertukaran fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang telah sepakat dalam perjanjian itu dalam rangka mencapai tujuan dari kedua negara terkait.

Dalam Penelitian yang dilakukan penulis penerapan konsep kerjasama bilateral antara Cina-Iran mengacu kepada proses kerjasama di bidang energi. Peran pemerintah sangat penting disini dalam pengambilan keputusan sebuah kerjasama bilateral antar kedua negara. peneliti akan menggunakan konsep ini

dalam melihat bagaimana proses peningkatan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara dalam memenuhi kepentingan nasional dari Cina.

I.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan dan tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau yang diteliti secara ilmiah. Metodologi digunakan untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Creswell dan Clark (2007:4) menjelaskan istilah metodologi penelitian sebagai *“the framework that relates to the entire process of research”*. Definisi ini menjelaskan metodologi penelitian sebagai kerangka atau proposisi filosofis yang mempengaruhi pikiran dan penelitian seseorang. Dalam konteks ini, seseorang terdorong untuk melakukan penelitian karena adanya asumsi-asumsi mendasar yang diyakininya sebagai suatu kebenaran (Agustinus Bandur, 2014, hlm 11). Dalam hal ini jenis metodologi penelitian yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian berdasarkan aturan berpikir dalam penelitian yang pengelolaannya dilakukan melalui analisis.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Densin dan Lincoln, kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan beragam material empiris yang digunakan seperti studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan individual (Rulam Ahmadi, 2014, hlm 15). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti melakukan upaya untuk mengkaji kasus dengan penggunaan dan pengumpulan data secara empiris melalui pengamatan di lapangan kemudian di analisis dan juga dihubungkan dengan teori yang digunakan. Dalam skripsi ini, peneliti berusaha untuk melakukan analisis terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai Kebijakan Cina dalam meningkatkan kerjasama energi dengan dengan menghubungkan teori yang ada dan relevan.

1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah dengan penelitian deskriptif yaitu cara untuk menggambarkan dan menganalisa berbagai situasi dari permasalahan yang diteliti dengan cara menganalisa dan menyajikan data secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan situasi faktual terkait dengan kebutuhan energi Cina yang besar yang mengharuskan Cina menerapkan kebijakan energi untuk mendapatkan pasokan energi yang cukup dan jangka panjang, dalam kasus ini adalah kebijakan Cina terhadap Iran. Kemudian diharapkan penulis dapat mengetahui kebijakan yang dilakukan kepada Iran apakah nantinya akan bisa diterapkan pada negara selain Iran.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis data. Penulis memilih data sekunder yang terdiri dari tinjauan pustaka mengenai keamanan energi Cina dan Kebijakan Cina dalam meningkatkan kerjasama energi dengan Iran.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder didapatkan dari kajian kepustakaan berupa literatur sumber bacaan dan data- data tertulis seperti Buku, Jurnal, Skripsi, tesis dan Media Elektronik (Situs Internet). Pengumpulan data sekunder digunakan untuk mempelajari informasi terkait dengan Kebijakan Cina - Iran dalam meningkatkan kerjasama energi.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Analisis data secara umum menurut Neuman merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*). Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi ke dalam istilah-istilah teori sosial atau latar di mana teori sosial itu terjadi. Peneliti kualitatif pindah dari deskripsi peristiwa historis atau latar sosial ke interpretasi maknanya lebih umum. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensistesisikan, dan merenungkan data yang direkam juga meninjau kembali data mentah dan terekam (Rulam Ahmadi, 2014, hlm 230). Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan menganalisis data yang ada secara deskriptif serta data yang ada di lakukan identifikasi yang kemudian diinterpretasikan secara sistematis dan rinci. Cina merupakan negara dengan konsumsi energi yang sangat besar pertahunnya dan terus meningkat, hal ini menyebabkan adanya kepentingan Cina dalam menjaga keamanan energi untuk memenuhi permintaan energi domestik dan mencari negara pengimpor minyak untuk menjaga pasokan energi Cina. Iran yang merupakan negara pengeksport minyak besar menjadi target Cina untuk menjaga pasokan energi minyak, terkait hal tersebut maka dilakukan analisis kebijakan yang dilakukan Cina dalam upaya meningkatkan kerjasama energi dengan Iran sehingga diketahui kebijakan apa yang diterapkan oleh Cina terhadap Iran.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menjabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian penjabaran mengenai pendahuluan yang di mulai dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA KEAMANAN ENERGI GLOBAL CINA 2011 - 2016

Bab ini berisi tentang keamanan energi Cina serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Cina dalam skala global serta dinamika keamanan energi global Cina yang nantinya akan berfokus pada alasan kenapa Cina harus meningkatkan kerjasama energi dengan Iran.

BAB III KEBIJAKAN ENERGI DAN UPAYA CINA DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA ENERGI DENGAN IRAN 2011 - 2016

Bab ini membahas mengenai dinamika hubungan Cina dan Iran serta kebijakan dan upaya apa saja yang dilakukan Cina dalam prosesnya meningkatkan kerjasama energi dengan Iran periode 2011-2016.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian dari kesimpulan serta saran dari penjelasan serta analisa yang telah dibahas didalam bab-bab sebelumnya. Kemudian, kesimpulan dan saran yang telah penulis berikan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN